



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI BOWO
2. Jabatan : KEPALA KANWIL
3. NHK : 136148

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 3.946.435.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 229 m²/150 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.195.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 288 m²/100 m² di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/75 m² di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 450.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1000 m²/192 m² di KAB / KOTA KOTA PEMATANG SIANTAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.146.240.000
5. Tanah Seluas 1891 m² di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 50.000.000
6. Tanah Seluas 896 m² di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 50.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 193 m²/100 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 427.000.000**

1. MOTOR, HONDA MF 125 TR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI OUTLANDER MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOBIL, HONDA MINIBUS CRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 110.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	335.490.105
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.647.799.004
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.194.081.234
Sub Total	Rp.	8.660.805.343
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.660.805.343

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.